



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterlibatan media massa dengan kegiatan politik bukan barang baru di Indonesia. Media massa sudah sejak lama digunakan sebagai saluran komunikasi politik. Kehadiran media massa tidak saja bisa dimanfaatkan oleh mereka yang mempunyai ambisi-ambisi politik tertentu, akan tetapi media massa juga mempunyai kemampuan untuk menyeleksi mana yang penting dan mana yang tidak penting untuk diberitakan sesuai dengan tujuan, visi dan orientasi media itu sendiri.

Kehidupan media massa juga sangat ditentukan oleh "kondisi di mana ia hidup, yakni sistem politik, sistem kekuasaan, serta kultur kekuasaan." Dan Indonesia amatlah dekat dengan hal itu. Tiap presiden punya aroma kekuasaan tertentu. Di fase Soekarno, orde lama, dan fase Soeharto, orde baru, misalnya, hubungan kekuasaan dengan media punya represi yang berbeda-beda. Pers menghirup udara kebebasan dengan kepengapan dan keleluasaan silih berganti. Intinya, setiap perubahan sistem politik akan merubah sistem pers, sekaligus dan serentak, sesuai yang dikehendaki kekuasaan.

Sejak keruntuhan rezim Soeharto, pers Indonesia sebetulnya telah berada pada era kebebasan. Ada banyak media yang tadinya dilarang terbit bisa terbit kembali. Ketentuan SIUPP dan STT sudah tak berlaku lagi. Ancaman pers kini telah berubah dari vertikal (negara) ke horizontal. Ancaman kini datang dalam bentuk komunalisme, gugatan pengusaha bermasalah, termasuk ancaman dari pemodal.

Namun demikian, di era kebebasan yang dirasakan saat ini, bukan berarti pengaruh politik dan kekuasaan benar-benar lepas terhadap pers tanah air. Ada semacam "ketergantungan" yang tak bisa dilepaskan oleh sebagian media massa terhadap rezim politik dan kekuasaan yang ada. Terlebih pada media-media amatir dan bermodal tipis, ketergantungan itu akan amat kentara muncul ke permukaan, bahkan dipertunjukkan dengan tebal muka.



Era kebebasan saat ini pun, membuat siapapun bisa memiliki dan mendirikan media, termasuk mereka-mereka yang berkantong tebal dan merupakan tokoh politik ternama. Oleh karena itu maka tidak heran, adakalanya media memiliki kepentingan untuk kelompok dan partai politik tertentu.

Menurut Ashadi Siregar, kepentingan pragmatis media pers bisa berwujud dengan terjadinya aliansi kepentingan antara kekuasaan politik-ekonomi dengan media pers yang mewujud dalam pemberitaan media pers. Dengan kata lain, media pers bisa dijadikan alat hegemoni bagi kekuasaan politik sesuai dengan kepentingan mereka. Ashadi Siregar memetakan tiga fungsi instrumental media, yaitu untuk memenuhi fungsi pragmatis bagi kepentingan pemilik media itu sendiri, bagi kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik dari pihak di luar media, atau untuk kepentingan warga masyarakat.¹

Pemilihan kepala daerah merupakan peristiwa politik di Indonesia yang selalu menarik perhatian berbagai kalangan baik praktisi (politikus), akademisi, pengamat maupun masyarakat umum. Apalagi ekperimentasi demokrasi di level daerah ini mulai mendapatkan legitimasi semenjak lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pada penghujung September 2004 lalu. Undang-undang tersebut lahir sebagai revisi atas UU pemerintah daerah sebelumnya (UU No. 22/1999). Pada pasal 24 UU No 32/2004 tersebut dinyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah diharuskan dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.²

Pemilihan kepala daerah secara langsung sekarang ini mempunyai makna tersendiri pada era reformasi setelah jatuhnya rezim Soeharto yang telah banyak meninggalkan ”borok” dan kebobrokan moral dalam praktek perpolitikan. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu solusi dalam mengatasi kemelut politik yang ditandai dengan krisis di berbagai aspek kehidupan berbangsa.

¹Alim Sumarno, Mpd, *Peran Media dalam Membangun Masyarakat Multikultur*, dalam <http://alimsumarno.blog.unesa.ac.id>, diakses 14 Januari 2017

²Situs www.kpu.go.id, UU no 23/2004, pasal 24, diakses 14 Januari 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Pekanbaru sendiri, wacana politik semakin intens memenuhi pemberitaan media pers menjelang pelaksanaan pilkada Pekanbaru. Lebih-lebih saat kampanye Pilkada, setiap kekuatan politik sedang giat-giatnya berpropaganda, mencari dukungan. Surat kabar, menjadi salah satu media yang diincar untuk dijadikan corong suara bagi suatu kepentingan politik dan ideologis tertentu. Hampir semua surat kabar yang terbit di Pekanbaru, memberi porsi khusus terhadap rangkaian proses pemilihan kepala daerah (walikota) Pekanbaru.

Walaupun dihelat Februari 2017, kontestasi politik tingkat lokal khususnya di kota Pekanbaru persaingannya sudah mulai terasa sejak 2016, terutama lagi paska diumumkannya nama-nama kontestan yang akan bertarung pada Pilkada 2017. Sejak saat itu pulalah, media ikut terjun kedalam dinamika politik yang ada tentu dengan konstruksi yang berbeda-beda.

Secara umum, wacana pemberitaan yang berkembang pada media adalah kepopuleran figur calon kepala daerah (walikota) Pekanbaru dan upaya dari masing-masing kubu dan kontestan untuk meraih simpati masyarakat pemilih. Namun demikian, yang menarik untuk diperhatikan dalam melihat perilaku media pada momen menjelang Pilkada ini adalah konstruksi pesan politik yang ingin disampaikan media, melalui pemilihan dan penggunaan bahasa jurnalistik.

Riau Pos merupakan harian terbesar sekaligus tertua yang ada di Riau, dimana pada 17 Januari 2017 mendatang usianya sudah mencapai yang ke-26 tahun. Di usia tersebut, harian dengan tiras ratusan ribu eksemplar itu, tentunya telah ”berpengalaman” dalam memberitakan proses pemilihan kepala daerah di provinsi Riau.

Sebagai media berplat hitam (swasta red), Harian Riau Pos secara kasat mata selama ini mampu menempatkan dirinya sebagai media yang independen, tidak memihak serta tidak berafiliasi dengan partai politik apapun. Namun, independensi yang ada, akan menjadi samar pada pandangan kita, ketika Riau Pos dan media lain pada umumnya, berada pada kondisi-kondisi tertentu.



Kondisi yang dimaksud antara lain ketika kondisi keuangan media sedang dalam krisis; ketika tawaran iklan datang dalam porsi besar dari salah satu pasangan calon kontestan Pilkada; ketika media sudah terlanjur terikat kontrak iklan/pariwara secara permanen (tahunan), khususnya dengan Calon dari Petahana.

Apalagi, secara umum sebagai pembaca surat kabar, kita sadar bahwa informasi yang tersaji dan dijual di surat kabar tidak bebas nilai. Punya maksud dan tujuan, baik terselubung atau terang-terangan. Krisnawan dalam kata pengantar bukunya "Pers Memihak Golkar" (Mei, 1997) menyebut berbagai peristiwa dan gagasan di masyarakat, yang terpublikasi dalam tulisan, foto dan gambar kartun/karikatural, tidak disampaikan begitu saja oleh media. Ada praktek seleksi dan interpretasi dalam proses produksinya. Surat kabar sebagai media komunikasi massa mendefinisikan realitas empiris. Hanya sebagian dari realitas saja yang dikabarkan dan perlu dikonsumsi pembaca.³

Beranjak dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang sikap media Harian Riau Pos dalam mengkonstruksi berita seputar Pilkada kota Pekanbaru. Menariknya penelitian ini, untuk melihat apakah media plat hitam ini benar-benar murni dan objektif dalam setiap pemberitaannya, atau malah sebaliknya, Riau Pos justru memainkan perannya dalam menggiring opini publik terhadap satu atau lebih pasangan calon yang bertarung. Maka dengan ini, penelitian ini penulis beri judul "**Analisis Wacana Berita Pilkada Pekanbaru 2017 Pada Surat Kabar Harian Riau Pos**".

B. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas dan menghindari terjadinya kesalahpahaman (miss understanding) dalam memahami judul penelitian ini, maka sangat perlu bagi penulis untuk memberikan batasan dan penjelasan istilah-istilah yang dipakai dalam

³Y. Krisnawan dalam kata pengantar buku: *Pers Memihak Golkar: Suara merdeka dalam pemilu 1992*, Jakarta, Institut Studi Arus Informasi, ISAI,1997



penelitian agar tidak terjadi kekaburan (distorsi). Adapun istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Wacana

Analisis wacana adalah studi struktur pesan dalam komunikasi. Analisis wacana lahir dari kesadaran bahwa persoalan yang terdapat dalam komunikasi bukan terbatas pada penggunaan kalimat dan kata. Tetapi juga mencakup struktur pesan yang lebih kompleks dan inheren yang disebut wacana.⁴ Dalam upaya menganalisis unit bahasa dari kalimat yang digunakan surat kabar harian Riau Pos, analisis wacana tidak terlepas dari pemakaian kaidah berbagai cabang ilmu bahasa seperti halnya topik, skematik, semantik, sintaksis, stilistik dan retorik pada media massa tersebut.

2. Berita

Berita adalah suatu fakta atau idea tau opini aktual yang menarik dan akurat serta dianggap penting bagi sejumlah besar pembaca, pendengar maupun penonton.⁵

Pemberitaan adalah hasil liputan yang diterbitkan oleh media. Dalam Wikipedia Indonesia, pemberitaan atau reportase adalah laporan lengkap atau interpretatif (telah disajikan sebagaimana dianggap penting oleh redaksi pemberitaan) ataupun berupa berita penyelidikan (Investigatif reporting) yang merupakan pengkajian fakta-fakta lengkap dengan latar belakang, trend/kecenderungan, yang mungkin terjadi pada masa mendatang.⁶

3. Pilkada Pekanbaru

Pilkada yakni pemilihan langsung kepala daerah yang dilakukan oleh rakyat dan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

⁴ Alex Sobur, *Analisis teks media*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2001, hlm 48

⁵ Deddy Iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi, Menjadi Reporter professional*, Bandung, RemajaRosda karya, 2005, hlm 21

⁶ Situs Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan>, diakses 14 Januari 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/ Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penyelenggaraan PILKADA telah diatur dalam Undang-Undang berikut adalah Dasar Hukum Penyelenggaraan PILKADA yang antara lain adalah :

- 1) Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Pemerintah Daerah
- 2) Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 17 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 4) Peraturan Pemerintah pengganti uu nomor: 3 tentang perpu no 3 tahun 2005

4. Surat kabar harian Riau Pos

Harian Riau Pos adalah sebuah lembaga penerbitan surat kabar di Riau. Awalnya surat kabar ini terbit mingguan dengan jumlah empat halaman. Kemudian terbit empat kali seminggu dan sekarang berubah menjadi surat kabar harian.

Surat kabar riau pos di terbitkan oleh PT. Riau Pos Intermedia. Terbit pertama kali sebagai harian pada tanggal 17 januari 1991 di gedung percetakan milik pemda riau di jalan Kuantan Raya Pekanbaru. Edisi pertama bertepatan dengan meletusnya perang teluk I dengan sub judul “George Bush Yakin Tekan Gagal, Sadam Janjikan Kemenangan” dengan delapan halaman. Sebelum Riau Pos terbit sebagai surat kabar harian, surat kabar harian riau pos adalah sebuah koran mingguan.pertama kali terbit tahun 1989. penerbit nya adalah Yayasan Penerbitan dan Percetakan Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makmur, yang didirikan dengan akte notaris Syawal Sultan.dalam sejarah perkembangan Riau Pos adalah kelanjutan dari surat kabar mingguan Warta Karya yang di ketuai oleh H.Imam munandar, Gubernur Riau waktu itu. setelah bertahan selama beberapa bulan,akhirnya Warta Karya berhenti penerbitan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah penulis merumuskan permasalahannya dalam menalaah berita pelaksanaan pilkada Pekanbaru 2017, yaitu “Bagaimana Analisis Wacana Berita Pilkada Pekanbaru 2017 Pada Surat Kabar Harian Riau Pos?”.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui analisis wacana berita pilkada Pekanbaru 2017 di surat kabar harian Riau Pos.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat pada tiga dimensi, yaitu segi teoritis,praktis dan akademis.

a. Teoritis

Hasil dari penelitian nantinya diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan pada perkembangan serta pendalaman studi komunikasi khususnya dalam bidang jurnalistik yang berkaitan dengan analisis wacana pemberitaan menggunakan metode Teun A. Van Dijk.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan bagi akademis, praktisi, mahasiswa jurnalistik dan kepada pembaca pada umumnya serta dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat agar lebih kritis dalam memaknai sebuah berita.



c. Akademis

Memberi sumbangsih ilmiah dalam studi wacana mengenai berita pilkada Pekanbaru 2017. Dan menjadi pedoman untuk penelitian berikutnya dibidang jurnalistik.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini, dituangkan dalam skripsi yang disusun berdasarkan sistematika penulisan berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai Latar Belakang masalah, penegasan istilah, Perumusan Masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini berisikan mengenai kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini berisikan tentang sejarah surat kabar harian Riau Pos dan struktur organisasi dari surat kabar harian Riau Pos.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai penyajian data, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan yang berisikan kesimpulan dan saran.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA